

**Ikhtisar Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)**

Instansi Pemerintah : Mahkamah Agung RI
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Jakarta

No	Penilaian	Nilai
I	Pengungkit (Pemenuhan + Reform)	59,53
	a. Manajemen Perubahan	8,00
	b. Penataan Tata Laksana	7,00
	c. Penguatan Manajemen SDM	9,62
	d. Peningkatan Akuntabilitas	10,00
	e. Penguatan Pengawasan	14,91
	f. Peningkatan Pelayanan Publik	10,00
II	Hasil	39,87
	a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	
	1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	17,41
	2. Capaian Kinerja lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya	5,00
	b. Pelayanan Publik yang Prima	
1. Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP)	17,46	

**Nilai diambil dari sheet utama dalam LKE ZI Permenpan 90/2021*

PENJELASAN SINGKAT PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM

1. Hasil konkrit dari pembangunan ZI setelah mendapatkan WBK

- a. Capaian Peningkatan Kinerja Utama
 - 1) meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui laporan LKjIP dari nilai BB menjadi A pada tahun 2018 – 2020, dengan hasil capaian indikator kinerja 100% atau lebih terhadap seluruh indikator kinerja utama;
 - 2) meningkatnya proses penyelesaian perkara dari 90 hari menjadi 75 hari sebagai hasil dari penerapan kebijakan membaca berkas bersama (MBB) berdasarkan SK KPT Nomor 157 tahun 2021, penyeragaman format putusan dan berita acara sidang berdasarkan SK KPT Nomor 151 tahun 2022 serta penerapan e-Monev banding (SIMONTOK);
 - 3) penerapan teknologi informasi yang optimal dalam pencapaian kinerja melalui sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), E-Court Banding, e-Berpadu, mekanisme survei melalui Si Super, elektronik persuratan PTSP serta manajemen media yang optimal melalui website, instagram, youtube dan podcast.
- b. Capaian Peningkatan Pelayanan Publik
 - 1) meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat dengan optimalisasi monitoring penanganan pengaduan masyarakat sehingga seluruh pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti;
 - 2) meningkatnya kualitas pelayanan dengan menyederhanakan, mempercepat, mengoptimalkan dan menerapkan nilai anti KKN yang membuat kepercayaan publik meningkat, sehingga pada akhir tahun 2022 Pengadilan Tinggi Jakarta mendapatkan nilai IKM 3,98 dan nilai IPAK 3,99 dengan predikat sangat baik dan bersih dari korupsi;
 - 3) pemenuhan fasilitas pelayanan yang optimal berupa sarana dan prasarana pelayanan publik dan pelayanan difabel.
- c. Capaian Peningkatan Pengawasan
 - 1) laporan gratifikasi nihil pada tahun 2018 – 2020;
 - 2) penetapan SK KPT Nomor 167a tahun 2021 tentang pedoman pengawasan daerah dan SK KPT Nomor 167b tahun 2021 tentang pedoman pengawasan bidang;

- 3) melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta yang dilakukan secara rutin untuk memaksimalkan integritas, penyelesaian tugas fungsi serta memastikan proses banding perkara dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Jakarta diproses sesuai SOP;
 - 4) berhasil dalam menindaklanjuti hasil temuan pengawasan Bawas berdasarkan laporan aplikasi Wastitama Bawas tahun 2022 dan memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepada pengadilan negeri berdasarkan laporan hasil pengawasan bidang dan pengawasan daerah tahun 2022.
- d. Hasil Pelaksanaan tugas sebagai Voorpost (kawal depan) MA RI
- 1) berhasil mendorong seluruh pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta dalam akselerasi e-register, dibuktikan dengan telah optimalnya nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) pengadilan negeri selama 6 bulan berturut-turut di tahun 2022;
 - 2) berhasil mendorong seluruh pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 10 (sepuluh) terbaik dalam pelaksanaan layanan eksekusi pada Penganugerahan MA Tahun 2022 yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - 3) berhasil mendorong Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi *Pilot Project* penerapan sidang tepat waktu;
 - 4) berhasil mendorong penerapan Sistem Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibuktikan atas Sertifikat Mutu Internasional MUTU-SMAP/021 dari Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2019.

2. Keterkaitan Pembangunan ZI dengan Isu Strategis Unit/Satuan Kerja

Berdasarkan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan, Pengadilan Tinggi Jakarta memiliki 3 (tiga) isu strategis yang menjadi tantangan yaitu:

- a. Solusi Penguatan Integritas atas Isu Gratifikasi;
- b. Peningkatan Kinerja untuk pemenuhan harapan publik yaitu penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan; dan
- c. Penguatan pemenuhan asas pelayanan publik untuk mendongkrak rendahnya kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Pembangunan Zona Integritas yang diatur oleh Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 adalah upaya yang diharapkan dalam meminimalisir risiko untuk meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas kinerja dan pelayanan dengan dua sasaran utama yaitu pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima di Pengadilan Tinggi Jakarta yang diukur melalui pencapaian sasaran atas komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Sehingga dengan adanya pembangunan zona integritas di Pengadilan Tinggi Jakarta diharapkan dapat menjadi solusi untuk meminimalisasi dampak atas tantangan pada isu strategis tersebut.

3. Inovasi Unggulan Dalam Penguatan Integritas, Kinerja, dan Layanan

Pengadilan Tinggi Jakarta telah berupaya untuk meminimalisir risiko melalui inovasi unggulan terhadap penguatan integritas, kinerja dan layanan dalam bentuk:

- 1) **Inovasi terkait penguatan integritas**, telah adanya area steril di Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mengurangi risiko KKN. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Jakarta juga telah memiliki ruang tamu terbuka yang bisa dimonitor oleh publik dalam hal menjamin pemerintahan yang bersih, serta telah adanya sistem internal terkait permohonan izin hakim dan pegawai yang bertujuan untuk memonitor kegiatan hakim atau pegawai di luar kantor saat jam kerja.
- 2) **Inovasi kebijakan Membaca Berkas Bersama (MBB)** telah dapat membuat proses penyelesaian perkara lebih cepat dari 90 hari menjadi 75 hari melalui pembacaan dokumen elektronik atau digitalisasi berkas perkara yang dikirim melalui e-Mail oleh bagian Kepaniteraan terkait kepada setiap Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.
- 3) **Inovasi penyeragaman format putusan dan berita acara sidang** yang menunjukkan dengan adanya perbaikan kualitas putusan yang mendukung percepatan proses penyelesaian administrasi.

4) Inovasi Media Operasional Terintegrasi (MONAS-SMART)

- a. Elektronik Perpanjangan Penahanan (E-Pernah), inovasi ini berhasil mempercepat prosedur administrasi perpanjangan penahanan, sehingga layanan perkara pidana menjadi efektif dan efisien;
- b. Elektronik Permohonan Penyempahan Advokat (E-SIPPA), yang mempermudah dan memangkas proses pengajuan permohonan penyempahan kepada calon advokat dengan memanfaatkan media elektronik;
- c. Sistem Informasi Administrasi Pegawai Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (SIAP-Bajak). Inovasi ini telah berhasil mengoptimalkan proses promosi dan mutasi Aparatur Pengadilan Tinggi Jakarta dan satuan kerja dibawahnya dalam upaya pengembangan kompetensi;
- d. Sistem Informasi Permohonan Riset (E-Perset). Otomasi proses permohonan riset telah memberi kemudahan pada pemohon riset untuk mengajukan permohonan penelitian di Pengadilan Tinggi Jakarta;
- e. Elektronik monitoring banding (SIMONTOK), merupakan aplikasi yang membantu pimpinan dalam pelaksanaan monitoring penyelesaian perkara banding, sehingga pelaksanaan monitoring berjalan optimal;
- f. Sistem Informasi Masyarakat Rentan (SIMANTAN), melalui sistem berbasis aplikasi ini mempermudah internal Pengadilan Tinggi Jakarta dalam mengkaji mengenai perbaikan akses kebutuhan serta menghimpun harapan, saran dan gagasan dari penyandang disabilitas untuk mewujudkan pelayanan prima;
- g. Sistem Informasi Layanan Pensiun Aparatur Terintegrasi Mahkamah Agung (SILA PERTAMA), yaitu sistem untuk melakukan pengusulan pensiun bagi hakim dan aparatur peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta;
- h. *Virtual Assistant* PT Jakarta, pengguna cukup menghubungi hotline whatsapp 0812-8698-2789 kapanpun dan dimanapun dalam hal mencari informasi terkait layanan Pengadilan Tinggi Jakarta.

4. Inovasi Unggulan Unit/Satuan Kerja yang telah Berhasil Direplikasi oleh Unit/Satuan Kerja Dalam atau Luar Instansi

Saat ini Pengadilan Tinggi Jakarta telah berhasil mengaplikasikan inovasi unggulan yaitu inovasi Sistem Informasi Masyarakat Rentan (SIMANTAN) yang telah direplikasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (telah dibuktikan dengan surat pernyataan replikasi dan surat keputusan penggunaan aplikasi di satuan kerja masing-masing).

Melalui sistem tersebut, masyarakat rentan dapat melakukan pendaftaran online pelayanan PTSP, memperoleh informasi alur pelayanan (secara tulisan, suara, dan video bahasa isyarat) dan mengajukan pengaduan serta penilaian survey harian atas pelayanan yang didapatkan.

5. Unit/Satuan Kerja Lain (Dalam atau Luar Instansi) yang Berhasil Mendapatkan Predikat Menuju WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setelah Melakukan Studi Tiru/Pendampingan

Pengadilan Tinggi Jakarta telah menerima kunjungan dari Badan Peradilan Umum (Badilum) dalam rangka Studi Tiru pembangunan zona integritas pada tahun 2021 yang pada akhirnya Badilum memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tanggal 20 Desember 2021 oleh Menpan-RB. Selain itu, Pengadilan Tinggi Jakarta telah melaksanakan pendampingan pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya. Hasil penilaian evaluasi dari TPI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperoleh nilai 94,61 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperoleh nilai 93,08 memenuhi syarat dan lolos untuk diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).